

Akademika

Pendidikan Suistik Multikultural dalam Pendidikan Karakter di Indonesia
Muhammad Husni, Muhammad Hasyim

Tafsir Ayat Al Qur'an tentang *Qalb* (Kajian Tafsir Maudhu'i)
Nurotun Mumtahanah

Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Karya Sastra Modrn
Miftakhul Muthoharoh

Paradigma Pendidikan Pembebasan *Paulo Freire*
Aridlah Sedy Robikhah

Konsep Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni
Roro Kurnia Nofita Rahmawati, Muftur Rahman

Ijtihad dan Problematika Kekinianan
Mohammad Ruslan

Implementasi Gerakan 1821 dalam Meningkatkan Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Rokim

Efektifitas Wayang Syadat sebagai Media Dakwah Islam di Dusun Kembangbau Purwokerto Ngimbang Lamongan
Khodzainul Ulum, Moh. Ah. Subhan ZA

Implementasi Budaya Relegius dalam Perkembangan Moral Peserta Didik
Abdul Manan, Siti Suwaibatul Aslamiyah

Sholat Sebagai Sarana Pelatihan *Mindfulness*: Jawaban untuk Tantangan Pendidikan Islam Menghadapi *The Age Of Complexity*
Victor Imaduddin Ahmad, Ahmad Suyuthi

Akademika

Akademika Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Victor Imaduddin Ahmad, Rokim

Tata Usaha

Fatkan, Siti Khamidah

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Muhammad Husni, Muhammad Hasyim</i>	Pendidikan Sufistik Multikultural dalam Pendidikan Karakter di Indonesia	1-12
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Tafsir Ayat Al Qur'an Tentang <i>Qalb</i> (Kajian Tafsir Maudhu'i)	13-30
<i>Miftakhul Muthoharoh</i>	Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Karya Sastra Modern	31-38
<i>Roro Kurnia Nofita Rahmawati, Mufiqur Rahman</i>	Konsep Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni	39-52
<i>Mohammad Ruslan</i>	Ijtihad dan Problematika Kekinian	53-62
<i>Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Mengucapkan Salam kepada Non Muslim (Analisis Teks al-Qur'an Hadits, Asbabul Wurud dan Implikasi Hukum)	63-72
<i>Rokim</i>	Implementasi Gerakan 1821 dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam	73-87
<i>Khozainul Ulum, Moh. Ah. Subhan ZA</i>	Efektivitas Wayang Syadat Sebagai Media Dakwah Islam di Dusun Kembangbau Purwokerto Ngimbang Lamongan	88-94
<i>Abdul Manan, Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Implementasi Budaya Religius dalam Perkembangan Moral Peserta Didik	95-104
<i>Victor Imaduddin Ahmad, Ahmad Suyuthi</i>	Sholat Sebagai Sarana Pelatihan <i>Mindfulness</i> : Jawaban Untuk Tantangan Pendidikan Islam Menghadapi <i>The Age Of Complexity</i>	105-121

KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM KELEMBAGAAN YANG HARMONI

Roro Kurnia Nofita Rahmawati
IAI Al-Khairat Pamekasan Madura
E-mail: kurnia.nofita@yahoo.com

Mufiqur Rahman
IAI Al-Khairat Pamekasan Madura
E-mail: mufiqurrohman@yahoo.com

Abstract: *This article discussed that institution would stay survived harmony through social construction Pierre Bourdieu with cultural capital, economy capital, and symbolic capital. The concept of educational multicultural need those capitals to create harmony institution, tolerance as the values of educational multicultural. So the bias idea constructed by Maskuri in this article is fixed with the concepts of the theory of Abraham Maslow, Talcott Parsons, Pierre Bourdieu that given a new perceptions on how to create and to build the harmony institution system based on the multicultural education.*

Keywords: *Multicultural education, harmony institution*

Pendahuluan

Suburnya kemajemukan etnis yang dimiliki Indonesia baik etnis, Tionghoa, Arab, India, pribumi, merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan, integritas dan persaingan yang positif. Tapi di sisi lain justru bisa menjadi pemicu terjadinya gesekan dan konflik disebabkan isu sara ras dan golongan. Ada banyak usaha integrasi nasional kebangsaan yang dilakukan, khususnya dalam aspek etnisitas, antara lain dengan pembauran etnis, undang-undang maupun perda yang secara khusus memberikan kesempatan bagi masyarakat non pribumi untuk berkontribusi untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara. Namun demikian kerap kali masih kita saksikan gesekan dan konflik yang terjadi di kalangan akar rumput maupun elit.

Kondisi kebinekaan Indonesia demikian di atas memberikan sebuah pengertian konsep multikulturalisme agama, etnis, bahkan budaya itu sendiri. Indonesia sebagai masyarakat multicultural (*multicultural societies*)¹ Indonesia terlepas dari diskursus masyarakat plural

¹ Berbicara tentang term masyarakat multicultural di Indonesia, penulis akan mengedepankan aspek "fair" atau keadilan di dalam melihat apakah Indonesia telah kompatibel dengan terminologi masyarakat multikultur atau hanya berhenti pada masyarakat plural. Jika kita menoleh ke Negara tetangga kita Malaysia maka salah satu abstraksi yang ditulis oleh Steve Fenton dari *University of Bristol* mengatakan bahwa Malaysia adalah Negara plural dan meragukan dirinya untuk mengatakan Malaysia adalah Negara multikultural. Namun Malaysia tengah berbenah untuk melakukan resolusi terhadap problem ketidaksamaan (*inequality*) dan perbedaan etnis tanpa menelaah diskursus multikulturalisme. Bahkan Fenton mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan model barat (*American models*). "Malaysia has often been described as a plural society composed of three large ethnic groups, Malays, Chinese and Indians. The discourse of "multiculturalism", so evident in Australia, Canada, the United Kingdom and the United States, is considerably less prominent in Malaysia. The Malaysian Government has pursued what may be termed "pro-Malay" policies, and there is little doubt that ethnic categories remain significant in daily life and institutional life. But at the same time Malaysia has produced its own plan of the resolution of problems of inequality and ethnic difference, without recourse to a discourse of "multiculturalism". We conclude by suggesting that this case study produces some critical questions for

atau multicultural, dalam konteks ini masyarakat multicultural dan dalam berdasarkan komunitas etnisnya menurut Furnivall terbagi menjadi 4 kelompok 1), masyarakat majmu' dengan kompetisi seimbang; 2), masyarakat majmuk yang mayoritas dominan; dalam artian tidak seimbang, kekuatan kelompok kompetitif lebih besar dari yang lain, 3), Masyarakat majmuk dengan minoritas dominan; etnis minor yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga memiliki keluasaan kekuatan misalnya dalam politik dan ekonomi, 4), masyarakat majmuk dengan fragmentasi; masyarakat yang terdiri dari sejumlah etnis tetapi semuanya dalam jumlah kecil sehingga tidak satupun kelompok yang dominan.²

Pendapat Furnivall di atas di konfirmasi oleh Ya'kub Cikusin salah satu guru besar di Universitas Islam di Malang bahwa dalam konteks Multicultural societies dominasi etnis kelompok masyarakat menjadi masalah utama. Ya'kub menegaskan bahwa Indonesia dapat dikatakan masyarakat multikultur jika tidak mendominasi sebuah kepentingan etnisitas kelompok tertentu, jika masih ada dominasi, probabilitas masyarakat plural lebih dominan.³

Indonesia dengan letak geografis dan peristiwa sejarah yang terjadi berdampak pada keberagaman di Indonesia. Siapa yang menggerakkan?. Pemikiran filsafat sejarah spekulatif mengungkapkan beberapa teori tentang penggerak sejarah. Novack (2017) merangkum motor penggerak sejarah sebagai berikut *Great God Theory; Great Men Theory ; Great Mind Theory ; Best People Theory ; Human Nature Theory*. Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius, pilihan teori cenderung berpihak pada *Great God Theory*. Spirit keagamaan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber pemikiran dan keyakinannya bahwa kehendak dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa adalah penggerak sejarah keberagaman.⁴ *Great God Theory* dalam kajian agama tersurat dalam alquran :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.*⁵

Ummat yang satu⁶ dimulai sejak diutusnya para nabi dan rasul dengan keberagaman ummat dan bentuk risalah dari generasi ke generasi. Agama mereka satu, tapi syariatnya

"Western" multiculturalism, and suggests a critique of a multiculturalism which is, in effect, dominated by Euro-American models" lihat Steve Fenton, *Malaysia and Capitalist Modernisation: Plural and Multicultural Models International Journal on Multicultural Societies (IJMS)*, Vol. 5, No. 2, 2003: 135 -147

² Wasino, *Indonesia from pluralism to multiculturalism* (Paramita vol 23 no 2 Juli 2013), 2-3.

³ Ya'kub Cikusin, *Masyarakat multicultural* (Kuliyah program doctoral UNISMA).

⁴ Agus Suprijono, & Sarmini, *Faktisitas Objektif Pluralisme Dan Upaya Membangun Kesadaran Kritis Warganegara Terhadap Keberagaman Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017*, l. 259

⁵ QS. Huud, 118-119.

⁶ QS. Al-Baqorah, 213 (kaana an-Nasu ummatan wahidah)

beragam, kitab-kitab beragam, Mereka menyampaikan hukum Allah sesuai dengan kitab dan risalah mereka. Maka dalam Islam keberagaman itu *Thobi'ie* dan bukan *Madzmum*.⁷

Dalam konsep dasar pendidikan multikultural, Maskuri Bakri menegaskan bahwa dalam Islam, pendidikan multicultural tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW tidak membatasi ummatnya untuk belajar dengan kepada siapa saja, dimana saja dan pada komunitas apa saja seperti tawanan perang yang non muslim/kafir pun bisa merdeka dengan syarat mengajarkan ilmu kepada ummat Islam. Sementara kebijakan Islam yang menyentuh pada aspek multicultural menurut Maskuri terjadi pada dinasti abbasiyah, terutama pada saat almakmun menjadi khalifah dimana pendidikan masa itu menjadi focus dan perhatian almakmun setelah didirikannya "*bait al hikmah*" sehingga muncul konsep multikulturalisme pendidikan yaitu; nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan toleransi, dan kesetaraan terutama pada pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemahan buku-buku dan sains dari bahasa Yunani. Kemudian perbedaan etnik kultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penerjemahan yang dibuktikan dengan banyaknya sarjana non Muslim dan berbagai kultur yang melakukan aktivitas tersebut.⁸

Indonesia adalah salah satu Negara multikulturalis terbesar di dunia. Sosiokultural maupun geografis begitu luas dan beragam dengan jumlah; pulau kurang lebih 13.000, penduduk sekitar 250.000.000, sementara suku lebih dari 3000, dan bahasa daerah sekitar 200. Sedangkan agama yang resmi sebanyak 6 agama (Hindu, Budha, Islam, Katholik, Protestan, dan Konghucu) ditambah kepercayaan lainnya. Keragaman ini, disukai atau tidak, akan menimbulkan persoalan dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Kebinekaan atau kemajemukan Indonesia ini menyolok seperti dikatakan oleh Hefner (2001), hanya beberapa wilayah di dunia yang memiliki kemajemukan seperti itu.⁹

Bagaimana kemudian konsep pendidikan multicultural melihat dan memberikan konsep kelembagaan yang eksis dan *survived* dengan harmoni dan kerukunan penulis akan melakukan kontruksi teoritis tentang konsep multikultural dalam pandangan James Bank, kemudian melihat (*review*) dengan membaca kembali (*rereading*) konsep dan teori survivalitas kelembagaan yang harmoni dan rukun melalui teori yang dikembangkan oleh piere bourdio dengan teori modalitas yang dikembangkan oleh Maskuri Bakri sebagai modalitas pengembangan kelembagaan. Bahwa dalam teori pengembangan kelembagaan menurut Maskuri sebuah lembaga harus memiliki sumber daya manusia dan modal intelektual, manejerial, sosial, network, spiritual, dan finansial¹⁰

Pendidikan Multikultural dan kelembagaan harmoni

1. Pendidikan Multikultural sebagai *Paradigma* kelembagaan

Dalam konteks Pendidikan, Penulis akan menggunakan teori James a Bank untuk menelaah *the dimension of multicultural education*. James menyebutkan ada 5 dimensi Pendidikan multicultural yang harus ada dalam Pendidikan multicultural ;

⁷ Muhammad I'marah, *al-Islam wa at-Taaddudiyah : il-Ikhtilaf wa at-Tanawwu' fi ithoril wahdati* (Mesir, 2011), 19.

⁸ Maskuri Bakri, *Kebijakan pendidikan Islam* (Tangerang Selatan; Nirmana media, 2013), 109-110

⁹ Muhammad Tholhah Hasan, *Pengertian dasar tentang multikulturalisme dan pendidikan multicultural* (Malang: Pascasarjana 3 Unisma), bahan kuliah program doctor PAI Multikultural, 2017, 5.

¹⁰ Maskuri Bakri, kuliah doctoral Unisma 17 oktober 2018

- a. *Content integration* (integrasi Pendidikan multicultural dalam kurikulum), yaitu bagaimana seorang pendidik dalam pembelajaran dapat membawa dan mengisi konten paedagogik dengan materi *variety of culture* keberagaman budaya.
- b. *The knowledge construction process* (kontruksi ilmu pengetahuan), bagaimana seorang pendidik dapat membantu siswa memahami dan melakukan investigasi dan menentukan asumsi kultural, sumber atau sejarah kebudayaan, dan sudut pandang kultural, yang mempengaruhi kepada kontruksi pengetahuan siswa.
- c. *Prejudice reduction* (pengurangan prasangka), dimensi ini berfokus kepada karakteristik siswa khususnya dalam perilaku rasial dan bagaimana focus ini dapat dimodifikasi dalam metode dan materi pembelajaran.
- d. *An equity pedagogy* (Pedagogik kesetaraan antar manusia), adalah bentuk kesetaraan antar manusia bagaimana guru dalam tujuan pencapaian pembelajaran dari siswa berlatar belakang perbedaan etnis dan ras, budaya, dan gender, dan kelompok sosial. Bagaimana tidak terjadi perbedaan ekonomi dan kelas social dalam menentukan pencapaian pembelajaran.¹¹
- e. *An empowering School culture and social structure* (pembedayaan budaya sekolah dan struktur sosial). adalah bentuk pengelompokan dan pelabelan dimana siswa di sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti olahraga, dan adanya komunikasi yang baik antar ras dan etnis dari guru ke siswa yang harus teruji dengan baik. Sehingga dapat memperdayakan dan menguatkan hubungan antar ras, etnis, dan kelompok gender.¹²

James A. Banks dikenal sebagai perintis Pendidikan Multikultural. Jadi penekanan dan perhatiannya difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada *mengajari bagaimana berpikir* daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Dia juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Bahkan interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandangnya. Siswa seharusnya diajari juga dalam menginterpretasikan sejarah masalah dan dalam pembentukan sejarah (*interpretations of the history of the past and history in the making*) sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Mereka perlu diajari bahwa mereka sebenarnya memiliki interpretasi sendiri tentang peristiwa masa lalu yang mungkin penafsiran itu berbeda dan bertentangan dengan penafsiran orang lain.¹³

Implementasi pendidikan multicultural di berbagai negara berbeda-beda. Bila melihat salah satu contoh pendidikan multikultural di Amerika, sebagaimana dikutip oleh

¹¹H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan besar masa depan dalam transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta : Gramedia, 2004), 140.

¹²James A. Bank & Cherry A. McGee Banks, *Multicultural education : Issues and Perspective* (United state of America : Willey, 2010), 22.

¹³Sutarno, *Teori dan pendekatan Pendidikan multicultural* (tanpa tahun terbit)

Tilaar dari hasil penelitian Banks, implementasi Pendidikan multikultural di Amerika meliputi berbagai dimensi, yakni:

- a. Dimensi kurikulum, yakni bahwa norma-norma kultur yang akan disampaikan pada siswa diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran, dengan rumusan kompetensi yang jelas.
- b. Dimensi ilmu pengetahuan, yakni bahwa perumusan keilmuan dari norma dan aturan kultur yang akan disampaikan itu dirumuskan melalui proses penelitian historis dengan melihat pada pengalaman sejarah tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam memperjuangkan multikulturalisme.
- c. Perlakuan pembelajaran yang adil, yakni bahwa perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara *fair* dan adil, tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnik tertentu, atau dari strata ekonomi tertentu.
- d. Pemberdayaan budaya sekolah, yakni bahwa lingkungan sekolah sebagai *hidden curriculum*, harus memberi dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan administrasi maupun berbagai layanan lainnya.¹⁴

Selanjutnya dalam menelaah kerukunan harmony dalam sebuah kelembagaan dalam multi etnis dan agama juga akan diperkuat dengan teori multikulturalisme. Banyak pakar yang mendefinisikan Multikultural sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa multikulturalisme identik dengan dengan keragaman kultural atau kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Istilah multicultural ini telah terbentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme.¹⁵ Multikulturalisme merupakan paham tentang keragaman budaya¹⁶ dan dalam keragaman inilah mulai lahir pemahaman-pemahaman tentang toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan sejenisnya. Paham-paham ini yang kemudian mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk menciptakan sebuah kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta terhindar dari berbagai konflik yang tak kunjung usai.¹⁷

Azumardi Azra (2007) dalam Tolchah, menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan kepada penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multicultural, yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Parekh (1997) mengutip dari Azra, (2007) menyebutkan bahwa masyarakat multicultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia. Suatu Konsep arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.¹⁸

¹⁴Dede Rosyada, *Pendidikan multicultural di Indonesia sebuah pandangan konsepsional* (Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014), 3. Lihat juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003,138

¹⁵Mohammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural...*,8.

¹⁶ Mengenai Pandangan Multikulturalisme Merupakan Paham Tentang Keragaman Budaya Baca Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2-6

¹⁷Achmad Rois: *Pendidikan Islam Multikultural...*308-309.

¹⁸Mohammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural...*,8

Pandangan Azra di atas kemudian dirincikan secara aplikatif oleh Atho' Muzhar, bahwa multikulturalisme adalah mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu Negara yang mejemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun mempunyai semangat untuk mengembangkan semangat lebangsaan yang sama dan mempunyai kebangsaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.¹⁹

Kemudian Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman tersebut (agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda) yaitu pluralitas (*plurality*)²⁰, keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multi kulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik.²¹

Sehingga dari beberapa pandangan tentang Multikulturalisme tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Multikulturalisme adalah satu pandangan dan paradigm/prinsip untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai keanegaraman, agama, suku, etnis, bahasa, sosial meski kita dapat menjaga identitas dan kepribadian kita. Kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan mengedepankan nilai toleransi dan saling menghormati dalam keanekaragaman.

Maka jika terminologi Multikulturalisme dijadikan landasan dalam dunia penelitian keragaman. Menurut Fredrick J. Baker pendidikan multikultural adalah "gerakan reformasi yang didesain untuk mengubah lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, pendidikan tinggi, dan universitas." Senada dengan pengertian di atas, Francisco Hidalgo, at.all menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah "pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya." Sementara itu, menurut Okado pendidikan multikultural merupakan "pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural." Pengertian senada dikemukakan oleh Keith Wilson bahwa pendidikan multikultural adalah "pendidikan yang didesain berdasarkan pembangunan konsensus, penghargaan, dan penguatan pluralisme kultural ke dalam masyarakat yang rasial."²²

¹⁹Ibid.,9.

²⁰ Apabila merujuk dari wikipedia bahasa Inggris maka definisi pluralisme adalah: "*In the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation* (Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi/pembiasaan. Achmad Rois: Pendidikan Islam Multikultural...306.

²¹ Tri Astutik Haryati, *Islam Dan Pendidikan Multikultural...*,155-156.

²² Abdullah Aly, *Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam* (Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume I, Nomer 1, Januari-Juni 2015),11.

Mengenai Nilai-nilai Multikulturalisme, beberapa nilai disebutkan dalam al-Quran dan dapat dijadikan acuan : Al-Musawah (kesetaraan/persamaan), Al-Rahmah (kasih sayang), Hablun min al-Nas (humanis), Al-Musawaroh (Demokrasi/mendahulukan dialog), Al-A'dl (Keadilan), Al-Tasamuh (toleransi), Al-Ta'ruf (kebersamaan), Al-Ta'awun (tolong menolong), As-Salam (kedamaian), Al-Ta'adudiyat (Plural), Al-'Afwu (inklusif), Al-Ikhsan (positive thinking), Al-Amanah (disiplin/jujur), dan Al-Tanawwu' (keberagaman).²³

Teori Weltanschauung dari bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tersirat dalam UU Dasar 1945 yang itu "bangsa yang cerdas" sudah tertentu bangsa yang cerdas terdiri dari individu-individu yang cerdas. Apakah yang dimaksud dengan individu yang cerdas. Pendidikan Multikultural merupakan sarana pengembangan manusia cerdas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun di dalam Nilai Pendidikan Islam Multikultural, Gusdur (dalam Mun'im 2005) menuturkan bahwa peradaban dunia ini dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan baik jika terwujud nilai-nilai multicultural, seperti Humanis, toleransi, menghargai, menerima, mengutamakan silaturahmi, (dialog) pada semua individu, kelompok organisasi, dan lintas paham keyakinan, menyayangi kaum lemah, dan minoritas, menjaga persatuan, dan perdamaian, mengembangkan budaya, menjaga kearifan budaya lokal dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan M. Tholhah Hasan menjelaskan bahwa nilai-nilai yang harus ada dalam masyarakat adalah komitmen untuk bisa hidupbersama, saling menghormati, bekerjasama, tolong menolong, gotong royong dalam suasana hidup rukun dan damai.

Kosep dasar dan prinsip internalisasi nilai Multikultural dalam disain pendidikan agama Islam berdasarkan pengembangan kurikulum sangatlah penting, sebab kurikulum dapat dipahami sempit (*narrow sense*) dan komprehensif (*wide sense*). Kurikulum dalam arti yang sempit dapat dipahami sebagai kurikulum transformasi ilmu kepada anak didik. Namun kurikulum secara global komprehensif adalah semua bentuk pengalaman yang baik (*good learning experience*) baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sudah terkonsep/terprogram. Nilai pendidikan multicultural didasarkan pada masyarakat yang memberikan apresiasi kepada keberagaman dan perbedaan (*diversity*). Menciptakan kedamaian (*creating peace*), menjaga hak asasi manusia (*protect human rights*) dan menegakkan demokrasi.

Dalam konteks pendidikan Islam. Konten kurikulum harus mampu mengakomodasi/menpresentasikan seluruh kelas. *At least*, untuk memperkenalkan kepada pembelajar bahwa Islam terdiri dari berbagai perpektif yang tidak ada satu elemen yang merasa paling benar dan menganggap yang lain salah. Yang demikian itu bukanlah bagian dari Islam. Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural harus berpegangan kepada prinsip dasar Islam yang meliputi **pertama**, *oriented on Islam* harus perpektif Islam, baik dalam pembelajaran dan nilai (*values*). Keduanya berpadu di dalam kurikulum, *philosophy*, tujuan, isi (*the contents*), metode pembelajaran (*teaching methods*), menjaga hubungan baik antar institusi pendidikan. **Kedua**, prinsip universal yang mendasari landasan kurikulum. **Ketiga**, Prinsip adanya keseimbangan antara prinsip dan konten kurikulum.

²³ Munif, *Multikulturalisme dalam pendidikan madrasah; Nilai, implikasi dan model pengembangan* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 42.

²⁴Ibid., 91.

Keempat, Prinsip kebutuhan antara individu dan sosial, keseimbangan antara lingkungan dan pendidikan, relevansi kehidupan sekarang dan yang akan datang, relevansi dengan kebutuhan dunia pekerjaan. **Kelima**, Prinsip keadilan dalam keberagaman anak, perbedaan kepribadian dan faktor status sosial. **Keenam**, prinsip fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi dan memberikan gerakan kebebasan dalam melakukan kreativitas. **Ketujuh**, Prinsip integrasi antar subjek, pengalaman aktivitas kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak dan kelompok. **Kedelapan**, prinsip efektifitas dan efisiensi dan penggunaan bahan sumber ajar yang menciptakan dampak positif dalam perkembangan anak.²⁵

McCormic (1983) dalam Thalchah Menyebutkan empat model multicultural dalam konteks pembentukan suatu bangsa, yaitu; Pertama, model *melting pot*, dalam pengertian peleburan etnisitas dan budaya menjadi sebuah bangsa baru, sehingga ciri-ciri etnisitas dan budaya lama yang membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang. Kedua, *model assimilation*, yaitu suatu pandangan yang membenarkan eliminasi perbedaan-perbedaan yang ada dan membaaur dengan kelompok yang dominan. Ketiga, Model *Salad Bowl*, yang memandang setiap individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati keragaman kultural yang berasal dari etnis, budaya, agama, bahasa dan dimana wilayah individu dan kelompok berasal. Dan pada saat yang sama mendukung kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan secara damai. Bangsa Indonesia mengikuti model ketiga ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keempat *model open nation*, suatu pandangan masyarakat terbuka, masyarakat dengan segala keragamannya dibebaskan mengambil cara yang dikehendaki dalam membentuk suatu bangsa.²⁶

Dalam konteks kemajuan/mutu lembaga pendidikan, atau eksistensi dan survivalitas suatu institusi penulis berpendapat model Salad Bowl merupakan model yang representatif sebab antara satu kelompok/individu dengan kelompok/individu yang lain dapat saling menghormati dan memahami. Mereka saling toleransi. Dalam teori toleransi ekonomi, Giacomo Corneo & Olivier Jeanne, (2006), mengatakan bahwa anak yang dari kecil mendapatkan pendidikan toleransi, baik dari orangtua maupun lingkungan, akan mudah mendapatkan kesempatan bekerja dan meningkatkan dan mempertahankan usahanya dibandingkan dengan yang berkepribadian intoleran.²⁷

2. Kelembagaan yang harmoni (rukun)

Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat kaya, termasuk dalam aspek etnisitas. Menurut lansir data dari BPS tahun 2010, negeri ini memiliki 1.340 etnis.²⁸ Di antara ribuan etnis yang ada di Indonesia, terdapat etnis asing, yaitu Etnis Arab, Cina, dan India. Etnis asing ini tersebar di sejumlah daerah, tak terkecuali di Pulau Madura. Bahkan di beberapa daerah itu, mereka membentuk perkampungan tersendiri. Perkampungan Arab atau Pecinan, misalnya, merupakan indikator fisik survivalitas mereka di Indonesia.

²⁵ Mohammad Mizan Habibi, *Islamic Education Curriculum Framework Development Based On Multicultural Values (Proceedings Of 99th The Iier International Conference, Mecca, Saudi Arabia, 23rd-24th March 2017*, Isbn: 978-93-86291-88-2), 41.

²⁶ Ibid, 11.

²⁷ Giacomo Corneo & Olivier Jeanne, *A theory of tolerance*, (Germany : Departmen of economic, 2006), 2.

²⁸<http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20indonesia/index.html>

Untuk mengkaji kelembagaan yang harmoni, akan digunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons atau yang terkenal disebut dengan teori skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, integration, latency*) dengan paradigma fakta sosial. Talcott menyakini AGIL ini dapat menjadi sistem yang dapat membuat seseorang bertahan dan mengembangkan hidupnya dalam sebuah kelembagaan dan kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang AGIL :

- a. Adaptasi (*adaptation*) : ada sebuah sistem yang harus memenuhi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan, kemudian lingkungan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*) adalah sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya
- c. Integrasi (*integration*) adalah sistem yang harus mengatur hubungan yang menjadi komponen dan mengatur hubungan ketiga (AGL).
- d. Latensi (*latency*) adalah pemeliharaan pola yang dapat mempertahankan budaya dan motivasi.²⁹

Menelaah teori AGIL ini menurut penulis sangat berkelindan dengan teori Abraham Maslow³⁰ tentang *Hirarki Need* bagaimana dalam mencapai tujuan kelembagaan, beberapa syarat kebutuhan (*need*) harus dipenuhi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta sayang dan kepemilikan, kebutuhan esteem (percaya diri), kebutuhan aktualisasi diri. Kelima kebutuhan ini menjadi sistem keberlangsungan pengembangan khususnya kelembagaan, dan kemudian untuk menelaah pemeliharaan dan mempertahankan kehidupan dalam dinamika masyarakat multi etnis dan agama, akan dikaji menggunakan teori survivalitas Pierre Bourdieu. Eksistensi dan survivalitas masyarakat multi etnis dan agama pasti mengalami tantangan di suatu wilayah (seperti pelabelan negatif dan penolakan) dan tidak berhasil keluar dari tantangan tersebut, ia akan “meninggalkan” wilayah itu. Sebaliknya etnis yang mampu melewati tantangan dengan aman atau mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat atau etnis setempat, ia akan tetap bertahan, eksis, dan survive. Begitu juga sebuah kelembagaan ketika telah memenuhi modalitas yang ditawarkan ini akan juga bertahan dan hidup berkembang dengan baik.

Untuk menelaah eksistensi dan survivalitas *harmony* kelembagaan sejatinya harus diawali oleh sebuah kajian dan penelitian tentang sebuah kelembagaan yang ada. Namun secara teoritis Pierre Bourdieu berpandangan bahwa survivalitas dapat dicapai apabila seseorang atau suatu kelompok kelembagaan mampu mengakumulasi dan menguasai modal sosial yang di dalamnya terdapat tiga bagian modal: modal kultural, simbolik, dan ekonomi.³¹ Dalam upaya bertahan hidup, setiap agen (individu, kelompok, maupun institusi) mesti berjuang untuk memperebutkan sumber dan pertarungan dengan akses terbatas dalam suatu ranah atau arena (*field*). Bagi Bourdieu, ranah sebagai sebuah arena sosial yang di dalamnya terdapat perjuangan mengumpulkan sekaligus menguasai

²⁹George Ritzer & Douglas J. *teori sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir, teori social post modern* (Bantul : Kreasi Wacana, 2012), 257.

³⁰Abraham H Maslow, *motivation and personality* (New York; Herper and Row, 1970), 37.

³¹Pierre Bourdieu, *In Other Word* (Cambridge: Polity Press, 1977), 88.

modalitas sosial tersebut.³² Modal yang telah dikumpulkan itu hanya akan membuahkan hasil-hasil dimana ia memproduksi dan mereproduksi.³³

Modalitas setiap agen (*agent*) terdiri dari: modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang tiga modal tersebut :

- a. **Modal kultural** adalah modal yang didapat agen melalui kemampuan yang diciptakan atau diperoleh dengan cara usaha. Wujud nyata dari modal kultural dalam realitas sosial adalah berupa pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan yang dimilikinya itu.³⁴ Aspek ini ditekankan oleh Maskuri sebagai SDM yang harus ada dalam sebuah lembaga dalam rangka mengembangkan sebuah kelembagaan. Menurut maskuri aspek intelektual merupakan aspek kultural di dalam bagaimana cara dan budaya intelektualitas di bangun dalam sebuah lembaga. Bahkan Maskuri meletakkan aspek ini pada urutan pertama dalam beberapa aspek yang harus dimiliki oleh sebuah kelembagaan.³⁵ Tiga aspek dalam teori multikulturalisme James Bank menurut hemat penulis masuk dalam kategori modal kultur yang disebut Pierre Bourdieu : yaitu *Content integration* (integrasi Pendidikan multicultural dalam kurikulum), *The knowledge construction process* (konstruksi ilmu pengetahuan), *Prejudice reduction* (pengurangan prasangka).
- b. **Modal ekonomi** tidak semata bermakna uang atau dana, melainkan juga termasuk modal yang berupa penguasaan atas tanah, sejumlah sumber daya, dan sumber ilmu pengetahuan. Metafora yang sering digunakan oleh Bourdieu dalam menjelaskan modal ekonomi ini adalah pasar (*market*).³⁶ Dalam realitas sosial, pasar merupakan medan untuk mempertaruhkan segenap modal yang dimiliki oleh agen guna memperoleh keuntungan. Hukum ekonomi konvensional menyebutkan hukum penawaran dan permintaan. Etnis Cina, berdasar modal ekonomi ini, menyisati bisnis yang digelutinya supaya modal ekonomi terus bertambah. Aspek ini akan digunakan untuk menelaah aspek ekonomi sebuah kelembagaan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, jenis usaha, dan jaringan bisnis mereka. Maskuri menjelaskan bahwa dalam pengembangan kelembagaan aspek finansial juga merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebuah kelembagaan. Teori James bank tentang *An equity pedagogy* (Pedagogik kesetaraan antar manusia), adalah bentuk kesetaraan antar manusia bagaimana guru dalam tujuan pencapaian pembelajaran dari siswa berlatar belakang perbedaan etnis dan ras, budaya, dan gender, dan kelompok sosial. Bagaimana tidak terjadi perbedaan ekonomi dan kelas social dalam menentukan pencapaian pembelajaran.³⁷
- c. Sedangkan **modal simbolik** merupakan segenap jenis relasi yang memiliki nilai dan makna dengan pihak lain.³⁸ Modal ini mewujud berupa hubungan kekeluargaan,

³² Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Penj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 124.

³³ Pierre Bourdieu, *Distinction, A. Social Critique of the Judgement of Taste* (New York: Routledge, 2006), 125.

³⁴ Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre.....*, 125.

³⁵ Maskuri Bakri, Kuliyah program doctor, Unisma 17 Oktober 2018.

³⁶ Pierre Bourdieu, *Distinction*, 65-113; Pierre Bourdieu, *Outline Of Theory Of Practice* (New York: Cambridge University Press, 1989), 184-186; Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre....*, 129.

³⁷ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan besar masa depan dalam transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta : Gramedia, 2004), 140.

³⁸ Ibid., 125.

lingkungan sekitar maupun pekerja yang di dalamnya terdapat relasi timbal balik.³⁹ Modal simbolik memang berbentuk material tapi tidak dikenali, misalnya berupa: selera berpakaian, logat yang baik, dan gaya. Semua ini bisa berlaku efektif tidak disebabkan oleh kematerialannya, melainkan dari kesalahpengenalan tentang hal ini.⁴⁰ Oleh karena modal simbolik ini dapat berupa prestise dan kemasyhuran yang didapat dari keluarga atau nama yang disandangnya, maka aspek ini akan digunakan untuk menjelaskan aspek prestise sebuah kelembagaan. Aspek modalitas simbolik ini jika konfirmasikan dalam kajian Maskuri tentang pengembangan kelembagaan maka akan menjadi muara dari berbagai syarat pengembangan kelembagaan. Aspek spiritual misalnya dalam modalitas simbolik dapatlah menjadi symbol sebuah kelembagaan yang mempertahankan symbol saling menghormati dengan budaya berjabat tangan, saling menghargai dengan simbol bertutur sapa dst. dalam konteks multikulturalisme teori James Bank tentang *An empowering School culture and social structure* (pembedayaan budaya sekolah dan struktur sosial). adalah bentuk pengelompokan dan pelabelan dimana siswa di sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti olahraga, dan adanya komunikasi yang baik antar ras tau etnis dari guru ke siswa yang harus teruji dengan baik. Sehingga dapat memperdayakan dan menguatkan hubungan antar ras, etnis, dan kelompok gender.

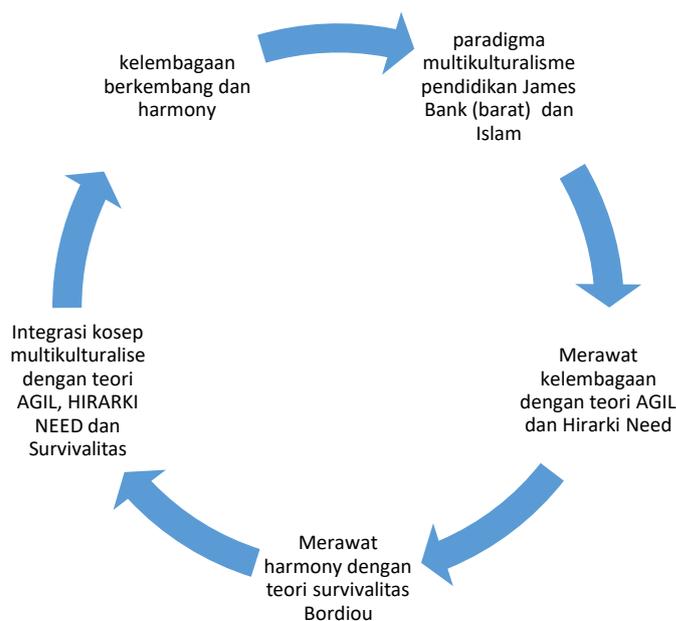
Dengan tiga modalitas di atas sebuah kelembagaan akan *survived* ketika tiga modal di atas dapat berjalan dengan baik dan berkesimbangan. Namun penulis ingin menanamkan selain teori Baourdio tentang tiga modalitas yang dianggap akan menjadikan sebuah kelembagaan *survived* dan harmony penulis ingin menawarkan satu lagi modalitas yang juga menurut hemat penulis sangatlah urgen dalam keberlangsungan sebuah kelembagaan. Yaitu modal politik. Modal politik ini akan bermuara kepada kebijakan pemerintah tentang sebuah regulasi pendidikan. Misalnya bagaimana sebuah kelembagaan akan *survived* jika kebijakan politik pemerintah tidak menyentuh kebutuhan multikulturasi kelembagaan. Contoh dalam kehidupan kelembagaan etnis Tionghoa yang dulunya tidak dapat menampilkan ekspresi secara bebas pada masa orde baru hari ini mereka dapat berekspresi secara bebas. Mereka berhak mengikuti semua program pemerintah yang dulunya sempat dilarang oleh politik orde baru dan orde lama. Maka modal politik ini dalam kontek pengembangan kelembagaan penulis menganggap perlu untuk dimiliki oleh sebuah kelembagaan.

Untuk mempermudah kontruksi teoritis dalam kajian konsep multikulturalisme dalam kelembagaan harmoni yang telah penulis jabarkan di atas, maka berikut ini adalah alur bangunan teori (*teorical frame*) yang secara gambling dapat dipahami sebagaimana gambar berikut :

³⁹ Pierrie Bourdieu, *Outline*, 171.

⁴⁰ Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (edt.), (*Habitus X Modal*) + *Ranah = Praktik* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 6.

Gambar 01.
alur kontruksi teori pengembangan kelembagaan yang *harmony* dalam konsep multikulturalisme



Penutup

Sebuah kelembagaan akan berkembang dan bertahan dan berlangsung *harmony* dalam kontruksi teori sosial Pierrie Bourdieu dengan modalitas kultural, ekonomi dan simbolik dan politik. Konsep pendidikan multikulturalisme dalam sebuah kelembagaan dalam kajian teoritis James Bank juga berdomain penting dalam mewujudkan kelembagaan yang *harmony*, toleran, dan terjadinya kontruksi nilai-nilai pendidikan multicultural sebagai modal kultur sebuah kelembagaan. Maka criteria yang diajukan Maskuri Bakri yang harus dipenuhi sebuah pengembangan kelembagaan sangat cocok dengan berbagai teori dalam kajian ini. Sementara itu teoritikus seperti Abraham Maslow, Talcott person, Pieree Bourdiou dengan teorinya masing-masing sesuai dengan kontruksi dan alur teorinya dalam kajian ini telah membuat sebuah pemikiran baru di dalam membuat sistem kelembagaan dengan paradigma multicultural yang dijabarkan oleh James Bank.

Penulis ingin meutup kesimpulan ini dengan pernyataan bahwa hamony di dalam pengembangan kelembagaan itu bisa dicapai jika dalam sistem kelembagaan tersebut terdapat paradigma multikulturalisme pendidikan yang dibangun dengan modalitas social kultural, ekonomi dan modal simbolik dan politik. Juga dipenuhi dengan hirarki kebutuhan. Dengan demikian novelte kajian ini adalah menciptakan kelembagaan yang *harmony* dengan pemikiran dan konsep teoritikus yang telah disusun oleh penulis.

Daftar Rujukan

- Maslow, Abraham H. *Motivation and personality*, New York; Herper and Row, 1970.
- Azra, Azyumardi. *Wasatiyyah for harmony and peace*, Makalah Konfrensi Internasional dengan tema "Islam Nusantara, National integrity, and world peace, Malang: Unisma, 2018.

- Supriatin, *Jokowi minta kelompok mayoritas & minoritas menghargai & menghormati merdeka.com*, 11/November/2016.
- Fabians, *Jokowi: Kita Ingin Mayoritas Melindungi Minoritas, Minoritas Menghormati Mayoritas*, Kompas.com, 11/November 2016.
- Fenton, Steve. *Malaysia and Capitalist Modernisation: Plural and Multicultural Models International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 5, No. 2, 2003*
- Wasino, *Indonesia from pluralism to multiculturalism*, Paramita vol 23 no 2 Juli 2013.
- Cikusin, Ya'kub. *Masyarakat multicultural*, Kuliyah program doctoral UNISMA.
- Suprijono, Agus. & Sarmini, *Faktisitas Objektif Pluralisme Dan Upaya Membangun Kesadaran Kritis Warganegara Terhadap Keberagaman Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017,l.*
- I'marah, Muhammad. *al-Islam wa at-Taaddudiyah : il-Ikhtilaf wa at-Tanawwu' fi ithoril wahdati*, Mesir, 2011.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Pengertian dasar tentang multikulturalisme dan pendidikan multicultural*, (Malang : Pascasarjana 3 Unisma), bahan kuliah program doctor PAI Multikultural, 2017,
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan besar masa depan dalam tranformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : gamedia, 2004.
- Bank, James A. & Cherry A. McGee Banks, *Multicultural education : Issues and Perspective United state of America : Willey*, 2010.
- Sutarno, *Teori dan pendekatan Pendidikan multicultural* (tanpa tahun terbit)
- Rosyada, Dede. *Pendidikan multicultural di Indonesia sebuah panndangan konsepsional (Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014)*, 3.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Multikultural; Membangun KembaliIndonesia Bhineka Tunggal Ika*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003
- Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, London: Sage Publication, 2002.
- Aly, Abdullah, *Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam*, Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume I, Nomer 1, Januari-Juni 2015.
- Bakri, Maskuri. *Kebijakan pendidikan Islam*, Tangerang Selatan; Nirmana media, 2013.
- Munif, *Multikulturalisme dalam pendidikan madrasah; Nilai, implikasi dan model pengembangan*, Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Habibi, Mohammad Mizan. *Islamic Education Curriculum Framework Development Based On Multicultural Values, Proceedings Of 99th The Iier International Conference, Mecca, Saudi Arabia, 23rd-24th March 2017, Isbn: 978-93-86291-88-2.*
- Corneo, Giacomo. & Olivier Jeanne, *A theory of tolerance*, Germany : Departmen of economic, 2006.
- Ritzer, George. & Douglas J. *teori sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir, teori social post modern*, Bantul : Kreasi Wacana, 2012.
- Pierre Bourdieu, *In Other Word*, Cambridge: Polity Press, 1977.
- Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Penj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

- Bourdieu, Pierre. *Distinction, A. Social Critique of the Judgement of Taste*, New York: Routledge, 2006.
- Bourdieu, Pierre. *Outline Of Theory Of Practice*, New York: Cambridge University Press, 1989.
- Harker, Richard. Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (edt.), (*Habitus X Modal*) + *Ranah = Praktik*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005.